



## Telaah Kinerja Keuangan Berbasis Value For Money

<sup>1</sup> Kristianus Hiktaop dan <sup>2</sup>Asrudi  
Fakultas ekonomi dan bisnis, universitas musamus  
e-mail: [hiktaop\\_akuntansi@unmus.ac.id](mailto:hiktaop_akuntansi@unmus.ac.id)

### ABSTRAK

*Abstrak:* Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan value for money pada 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua. Pendekatan value for money menekankan pada tiga aspek penilaian kinerja keuangan yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan paradigma deksriptif-kualitatif. Hasil penelitian rasio aspek ekonomis, menunjukkan bahwa kinerja keuangan selama 6 tahun terakhir di 15 kabupaten berfluktuatif dan berada di bawah angka 100 persen sehingga secara agregat dikatakan telah memenuhi syarat ekonomis value for money. Kedua, Kinerja keuangan dari sisi efisiensi selama 6 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan secara agregat berada di diatas 80% persen, sehingga kinerja keuangan telah memenuhi syarat efisiensi value for money. Yang terakhir, perhitungan kinerja keuangan dari sisi efektivitas selama 6 tahun terakhir secara individu per kabupaten dan secara agregat sangat berfluktuatif dan; tingkat efektivitasnya berada di atas 90 persen, dan termasuk dalam kategori cukup efektif sehingga memenuhi syarat efektivitas value for money. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas Pengelolaan keuangan selama 6 tahun terakhir 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah pengelolaan keuangan Belum optimal.

*Kata kunci:* kinerja keuangan, value for money

*Abstract:* This study aims to examine the financial performance of local governments using the value for money approach in 15 districts in the Central Highlands region of Papua Province. The value for money approach emphasizes three aspects of financial performance appraisal, namely economics, efficiency and effectiveness. This study uses a descriptive-qualitative paradigm. The results of the research on economic aspect ratios show that financial performance over the last 6 years in 15 districts has fluctuated and is below 100 percent so that in aggregate it is said to have met the economic requirements of value for money. Second, the financial performance in terms of efficiency over the last 6 years tends to fluctuate and in aggregate it is above 80% percent, so that financial performance has met the requirements for the efficiency of value for money. Finally, the calculation of financial performance in terms of effectiveness during the last 6 years individually per district and in the aggregate is very fluctuating and; Its effectiveness level is above 90 percent, and is categorized as quite effective so that it meets the requirements for Value for money Effectiveness. Thus, it can be concluded that the quality of financial management for the last 6 years in 15 districts in the Central Highlands region has not been optimal in financial management.

*Keywords:* financial performance, value for money

@copyright 2020 MJED FEB Universitas Musamus

Alamat korespondensi: Akuntansi dan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus Jl.Kamizaun, Mopah Lama, Merauke 99600 Indonesia

Email:<sup>1</sup> [hiktaop\\_akuntansi@unmus.ac.id](mailto:hiktaop_akuntansi@unmus.ac.id) Email:<sup>2</sup> [asrudi\\_fekon@unmus.ac.id](mailto:asrudi_fekon@unmus.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi fiskal masih menjadi pusat perhatian klayak. Hal ini wajar karena desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen penting di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal sebagai suatu instrument yang ditandai dengan mengalokasikan dana dalam jumlah nominal tertentu dengan maksud sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pada setiap tingkatan pemerintah di daerah. Disamping itu, desentralisasi fiskal itu menandai terciptanya hubungan akuntabilitas antara pemerintah pusat dan Daerah. Dalam hubungan yang formal ini, perlu diwujudkan dalam suatu akuntabilitas publik. Sumber keuangan yang dialokasi kepada pemerintah daerah yang seutuhnya diperuntuhkan untuk melakukan rekayasa struktur sosial yang di masyarakat dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian serta menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, lapangan terbang guna memperlancar lalu lintas barang, jasa, dan manusia.

Desentralisasi fiskal merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi, daerah. Kewenangan yang utuh meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen daerah yang sehat. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, ekonomis, efisien dan efektif dan akuntabel [1].

Sumber daya keuangan yang dilimpahkan ke daerah dituntut mengubah sistem penganggaran yang sebelumnya berbasis tradisional ke sistem penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan keuangan sebagaimana diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperuntuhkan untuk membiayai program-program pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembiayaan pelayanan publik tersebut perlu disampaikan kepada publik dalam bentuk laporan kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan. Ketika penerapan sistem penganggaran sektor publik yang sebelum sistem tradisional berubah menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja. Penilaian kinerja keuangan menjadi salah satu isu sentral di dalam entitas pemerintahan. Setiap unit pemerintahan dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Semakin meningkatnya tuntutan

pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi [2].

Anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu unsur penting di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari tingkat partisipasi berbagai stakeholder, tingkat transparansi dalam pelayanan, penegakan hukum secara adil. Oleh karena itu terdapat hubungan kausalitas antara anggaran berbasis kinerja dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu proses untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel di dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menandakan, proses pengelolaan termasuk di dalamnya pengalokasian terhadap sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum. Laporan keuangan yang yang disajikan oleh setiap tingkatan pemerintah menjadi salah satu indikator penting di dalam penilaian akuntabilitas publik. Memastikan kewajaran laporan keuangan yang dibuat setiap entitas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur keuangan yang lazim digunakan seperti membandingkan nilai-nilai yang ada pos-pos penerimaan maupun pos belanja yang dianggarkan dengan realisasinya. Rasio yang diperolehnya menjadi basis untuk menilai baik atau buruk kinerja pemerintah tertentu dari perspektif keuangan. *Value for money* merupakan salah satu konsep yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah berbasis kinerja. Menurut Mardiasmo dalam Liando *value for money* merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas [3].

Provinsi Papua terutama kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan Tengah identik dengan kondisi geografis yang bergunung-gunung, berbukit, dan wilayah yang sangat luas. Jarak antar kecamatan di dalam satu kabupaten saja sangat berjauhan. Faktor-faktor alam ini menyebabkan masih tingginya ketimpangan pembangunan antar kabupaten. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya strategis guna mempercepat pembangunan antar wilayah dan mempermudah konektifitas antarwilayah. Pemerintah pusat dapat mentransfer pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana alokasi umum, Dana Bagi Hasil, dana alokasi khusus, dan dana infrastruktur. Dana perimbangan terutama dana alokasi khusus dan dana infrastruktur merupakan dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan di bidang-bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah anggaran yang telah dilimpahkan hak pengelolaan kepada daerah setiap tahun cenderung meningkat. Namun beberapa indikator

keuangan masih jauh dari harapan. Misalnya, masih tinggi gap antara proporsi belanja operasional dengan belanja pembangunan atau belanja modal. Dari sisi penerimaan, setiap tahun mengalami peningkatan. Namun dari sisi pembiayaan terjadi ketidakseimbangan antara belanja operasional dengan belanja produktif. Ketidakseimbangan pengelolaan keuangan tersebut mengakibatkan pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kualitas pengelolaan keuangan 15 kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan Tengah provinsi Papua menggunakan pendekatakan *Value for Money*.

*Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis artinya memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara input dengan input value dinyatakan dalam satuan moneter. Kedua, efisiensi artinya pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk menggunakan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Ketiga, efektifitas artinya tingkat pencapaian hasil program dengan targe yang ditetapkan. Efektivitas dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan output Mardiasmo [3].

*Value for money* merupakan indikator yang memberikan informasi mengenai apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud antara lain ekonomi, efisien, dan efektif. Indikator ekonomi terkait dengan konsep kos untuk memperoleh input pada harga yang mendekati harga pasar. Input dalam hal ini berkaitan dengan seluruh sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. contoh input anggaran (dana), tenaga kerja, mesin. Efisiensi berhubungan dengan output yang dihasilkan dengan sumber daya input yang digunakan. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau memanfaatkan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Indikator terakhir, efektifitas. Efektifitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan (output) dengan hasil sesunggunya (outcome) yang dicapai. Semakin besar, kontribusi output terhadap pencapaian outcome (tujuan), maka semakin efektif suatu organisasi [4].

Penelitian yang mengukur kinerja keuangan Pengadilan Tinggi Tebing Tinggi menggunakan *value for money* menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak ekonomis dan tidak efisien, namun lebih efektif memberikan pelayanan kepada masyarakat [2]. Penelitian lainnya mengukur kinerja keuangan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Lhoseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Dispenda

telah memenuhi syarat ekonomis dan cukup efisien. Namun dari sisi lain, kinerja keuangan daerah kota Lhoseumawe tidak efektif [5]. Penelitian[6] mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya dan menemukan tiga komponen value form money menjukkan hasil yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kinerja kota surbaya melakukan penghematan anggaran, menggunakan sumber daya serendah-rendahnya (efisien) dan efektif. Sementara itu,[7] menemukan bahwa penerapan Value for money dapat meningkatkan kinerja kantor bupati Buleleng Bali. Hal serupa juga ditemukan oleh [8] elemen value for money secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dinas kelauatan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo. Di lain pihak, [9] menggunakan value for money mengukur kinerja keuangan kecamatan Susoh dan menemukan bahwa kinerja keuangan tidak ekonomis,cukup efisien dan cukup efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif-kualitatif. Menurut [10] penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang kemudian diklasifikasi dan dianalisis. Objek penelitian ini 15 Kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah provinsi Papua. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data time series dan Cross sectional berupa laporan keuangan antar kabupaten selama 6 tahun terakhir. Fenomena yang diteliti yakni kualitas pengelolaan keuangan menggunakan metode *value for money*. Metode atau Konsep *value for money* menekankan pada tiga aspek yakni Ekonomi, Efisiensi dan Efektifitas. Pengukuran ketiga indikator tersebut tampak dalam tabel 1 di bawah ini

Tabel 1: Pengukuran Variabel penelitian

Indikator	Perhitungan	Kriteria
Ekonomis	$\sum(RB/\sum AB) \times 100\%$	Jika <90%, Sangat ekonomis Jika 90%-94,99, eknomis Jika 95%-100%, Cukup Ekonomis Jika 100%-105% Kurang Ekonomis Jika > 105% tidak Ekonomis
Efisiensi	$\sum(RB/\sum RP) \times 100\%$	Jika >80%, Sangat efisien Jika 70%-79%, efisien Jika 60%-69 %, Cukup Efisien Jika 50%-59%, kurang efisien Jika <50%, tidak efisien
Efektifitas	$\sum(RP/\sum AP) \times 100\%$	Jika <90%, tidak efektif Jika < 90%-94,99% kurang efektif Jika 95%-100%, Cukup efektif Jika >100%, efektif

Sumber: diadopsi dari Khalikussabir, 2017 [11]

Keterangan:

- AP : Anggaran Pendapatan Per Kabupaten, tahun berjalan  
RP : Realisasi Pendapatan Per kabupaten, tahun berjalan  
AR : Anggaran Belanja per kabupaten, tahun berjalan  
RB : Realisasi Belanja per kabupten, tahun Berjalan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fokus utama penelitian ini antara lain menelaah kinerja keuangan 15 kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan antara lain tiga indikator *value for money*. Menurut *value for money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada publik apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Konsep *value for money* ini menekankan pada tiga indikator yakni ekonomi, efisiensi, dan efektifitas [4].

### Aspek Ekonomi

Secara umum konsep ekonomi terkait dengan penggunaan input yang hendek diperoleh suatu aktivitas. Aspek ekonomi menekankan bahwa untuk mendapatkan input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah yakni harga yang mendekati harga pasar. Untuk memahami aspek ekonomi, lebih baik diperlukan pemahaman tentang input itu sendiri. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan ouput [4].

Input dalam penelitian ini adalah diklasifikasikan menjadi dua, input utama adalah realisasi total belanja daerah setiap kabupaten. Sedangkan input sekunder adalah penanggaran total belanja daerah setiap kabupaten selama 6 tahun terakhir secara berturut-turut dari tahun 2012 -2017. Realisasi belanja dan Anggaran belanja di dalam struktur APBD setiap kabupaten diproxi sebagai input atas terlaksananya pembangunan disetiap kabupaten. Hasil perhitungan pengelolalan keuangan dari sisi ekonomi tampak dalam tabel 2.

Tabel 2. Rasio ekonomi pengelolaan keuangan 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua, tahun 2012-2017

KABUPATEN	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jayawijaya	71.96%	91.00%	90.61%	93.5%	93.52%	94.51%
Lany Jaya	77.01%	98.65%	92.60%	98.0%	93.53%	96.79%
Yalimo	76.00%	93.41%	86.84%	85.0%	89.40%	89.53%
Yahukimo	87.00%	94.38%	84.81%	92.2%	90.49%	93.58%
Nduga	97.81%	87.07%	89.41%	84.6%	87.96%	96.31%
Pegbin	80.95%	90.46%	86.80%	89.4%	73.38%	90.65%
Puncak	69.48%	75.63%	79.92%	87.1%	84.34%	78.16%
Puncak Jaya	96.18%	89.21%	90.13%	87.3%	87.70%	80.65%
Intan Jaya	97.16%	95.65%	85.86%	85.6%	92.06%	91.93%
Tolikara	86.01%	85.82%	76.47%	81.0%	76.40%	88.32%
Paniai	94.04%	93.36%	90.53%	97.7%	86.29%	91.35%
Deyai	96.75%	89.90%	90.62%	97.5%	97.23%	98.52%
Dogiyai	71.01%	80.61%	84.65%	90.8%	92.06%	93.52%
Mambramo Tengah	81.37%	82.82%	92.78%	95.8%	97.80%	94.89%
Mambramo Raya	90.91%	70.52%	91.18%	86.6%	92.57%	85.40%
Rata-Rata	74.15%	87.90%	87.55%	90.13%	88.98%	90.94%

Standar penilaian kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan pendapat Khalikussabir [11]. Dengan menggunakan Kriteria penilaian pengukuran kinerja dari aspek ekonomi sebagaimana tersaji dalam tabel 1. Bahwa rata-rata kinerja keuangan 15 kabupaten yang terdapat di wilayah Pegunungan Tengah selama 6 tahun terakhir dinyatakan sangat ekonomis. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan *value for money* dari aspek ekonomi masih di bawah 100 persen. Namun jika dilihat pergerakan rasio ekonomi setiap tahun per kabupaten cenderung fluktuatif dan masih dalam kategori sangat ekonomis. Beberapa kabupaten telah melebihi 90 persen sehingga kualitas kinerja keuangan dari aspek ini dinilai ekonomis. Namun secara rata-rata masih di bawah 90 persen sehingga, kinerja keuangan tergolong sangat ekonomis.

Semakin kecil rasio ekonomi menunjukkan semakin baik kinerja kabupaten dalam pengelolaan keuangan. Secara umum hasil penelitian empiris memperkuat konsep *value for money* untuk indikator ekonomi. Artinya kinerja keuangan secara aspek ekonomi dikatakan ekonomis. Di lain pihak, perlu mendapat perhatian beberapa kabupaten yang rasionalnya masih tinggi lebih dari 90 persen dan kecenderungan meningkat sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara ekonomis dan tepat sasaran. Salah satu penyebabnya letak geografis dan jarak antar kabupaten yang sangat berjauhan. Kedua faktor tersebut menyebabkan keterlambatan dalam hal menyediakan infrastruktur dasar memadai.

Sebanyak 15 kabupaten yang diteliti hampir 90 persen adalah kabupaten pemekaran dari dua kabupaten Induk yakni Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nabire. Proses membentuk Kabupaten-kabupaten di wilayah ini, dilakukan tanpa melalui persiapan yang matang. Pembentukan suatu tingkat pemerintahan atau Daerah Otonom Baru tentu dibentuk dengan mempertimbangkan kesipan daerah tersebut, dengan mengedepankan indikator-indikator pembangunan seperti kesiapan sumber daya manusia, kemandirian keuangan, kualitas infrasturktur dasar yang memadai. Namun pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru di Papua pada umumnya dilakukan bukan karena faktor kesiapan dari segala dimensi pembangunan. Namun lebih banyak terdorong oleh berapa alasan seperti alasan percepatan akses dan percepatan konektivitas antar kabupaten, serta kepentingan para elit politik local. Oleh karenanya, kurang lebih 20 tahun terakhir ini, pengelolaan keuangan telah dimanfaatkan secara simultan berkonsentrasasi pada pembangunan infrastruktur dasar maupun sumber daya manusianya. Sehingga secara rata-rata kualitas pengelolaan keuangan per kabupaten tidak menemenuhi kriteria sangat ekonomis.

### **Efisiensi**

Penilaian efisiensi suatu organisasi erat kaitan dengan produktivitas dari organisasi itu sendiri. Pada umumnya, efisiensi dapat diukur dengan menggunakan perbandingan antara output dengan input. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seendah-rendahnya. Pengukuran organisasi sektor publik dikatakan efisien apabila menghasilkan output sebesa-besarnya dan menggunakan input serendah-rendahnya [5].

Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%, atau semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai maka kinerjanya semakin baik atau semakin efisien [5]. Untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan penelitian ini dapat ditentukan dengan cara perbandingan realisasi total belanja dengan realisasi total pendapatan per kabupaten setiap tahun. Rasio efisiensi pengelolaan keuangan 15 kabupaten yang diteliti tampak dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rasio efisiensi pengelolaan keuangan 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah, provinsi Papua, tahun 2012-2017

Kabupaten	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jayawijaya	100%	98%	90%	91%	76%	83%
Lany Jaya	111%	98%	93%	89%	81%	72%
Yalimo	112%	107%	93%	91%	82%	81%
Yahukimo	100%	98%	97%	104%	78%	76%
Nduga	113%	100%	98%	93%	77%	80%
Pegbin	98%	93%	91%	103%	81%	80%
Puncak	95%	109%	103%	122%	95%	74%
Puncak Jaya	100%	99%	98%	85%	86%	74%
Intan Jaya	104%	97%	89%	92%	99%	84%
Tolikara	91%	86%	79%	86%	99%	61%
Paniai	96%	99%	97%	190%	87%	81%
Deyai	101%	90%	95%	104%	91%	84%
Dogiyai	90%	104%	102%	99%	96%	86%
Mambramo Tengah	113%	88%	97%	100%	98%	92%
Mambramo Raya	97%	73%	93%	96%	104%	96%
Rata-Rata	95%	96%	95%	103%	89%	80%

Tabel 3 ini menunjukkan trend efisiensi pengelolaan keuangan 15 kabupaten selama 6 tahun terakhir secara berturut-turut. Berdasarkan *rule of thumb* (tabel 1) penelitian ini, sangat berluktuatif dan secara rata-rata kinerja kuangan dari sisi efesiensi secara individu maupun rata-rata termasuk pada kategori sangat efisien.

Kualitas pengelolaan keuangan dari sisi efisiensi, sangat berfluktuatif selama 6 tahun terakhir. Beberapa kabupaten, rasio melebih 100 %, artinya kabupaten tersebut pengelolaan keuangan adalah efisien. Fluktuasi rasio efisensi keuangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan kinerja keuangan daerah masih rendah sehingga perlu menerapkan sistem tata kelola keuangan secara berkesinambungan. Kinerja keuangan yang baik adalah semakin kecil rasio efisiensi. Sebaliknya, semakin besar hampir mendekati 100 persen atau melebih dapat dikatan pengelolaan keuangan tidak efisien atau tidak tepat guna. Dengan kata lain bahwa produktivitas pemerintah kabupaten sangat rendah. Rendahnya kualitas pengelolaan keuangan tersebut menandakan perlu perbaikan di dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tepat sehingga berkontribusi secara maksimal peningkatan kualitas pembangunan.

### **Ekfektifitas**

Efektivitas terkait erat dengan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain bahwa efektivitas sangat relevan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan organisasi semakin besar output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi tersebut [4].

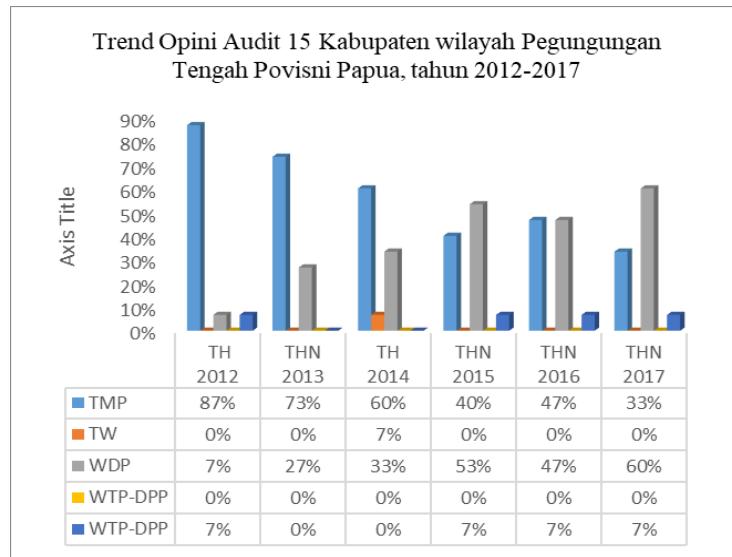
Efektivitas berfokus pada outcome. Oleh karena itu, efektivitas dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan output. outcome merupakan dampak yang ditimbulkan setelah suatu program dilaksanakan. Sementara output merupakan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan wilayah sampel, dapat dinilai dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan setiap kabupaten. Hasil penelitian terkait dengan efektivitas pengelolaan keuangan tampak pada tabel 4.

Semakin tinggi nilai efektivitas menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya semakin kecil rasio efektivitas menandakan kinerja keuangan yang berkualitas buruk atau rendah atau pengelolaan keuangan tidak efektif. Sebagaimana ditunjukkan pada (tabel 1) [11], penilaian efektivitas kinerja keuangan, 15 kabupaten wilayah sampel secara rata-rata cukup efektif. Hal ini rata-rata trend masih berkisar 90-99 persen dan mengalami berfluktuatif. Kinerja suatu organisasi sektor publik dikatakan efektif jika rasio mencapai 100 persen atau melebihinya. Kondisi kualitas pengelolaan keuangan ini menandakan pemerintah terus berupaya dalam menyelesaikan atau mengimplementasikan program-program yang telah dirancang secara tepat. Pada akhirnya program-program tersebut tidak direalisasikan dalam periode tersebut. Kondisi kualitas pengelolaan keuangan yang cukup efektif tersebut, perlu diperkuat dengan menerapkan tata kelola keuangan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan menjadi sangat efektif.

Tabel 4. Rasio efektivitas pengelolaan keuangan 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah, provinsi Papua, tahun 2012-2017

KABUPATEN	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jayawijaya	102.1%	100.4%	100.3%	96.9%	59.0%	94%
Lany Jaya	101.2%	100.0%	100.6%	98.7%	97.3%	97%
Yalimo	100.0%	98.1%	97.0%	90.5%	93.1%	100%
Yahukimo	101.0%	99.3%	91.5%	97.7%	92.4%	98%
Nduga	101.9%	99.9%	98.3%	97.7%	96.9%	99%
Peg. Bin	100.6%	101.1%	102.0%	98.8%	98.4%	96%
Puncak	97.0%	98.7%	96.0%	99.3%	91.2%	99%
Puncak Jaya	103.7%	90.2%	92.3%	93.2%	89.2%	86%
Intan Jaya	98.1%	101.4%	99.2%	99.2%	96.7%	100%
Tolikara	103.2%	100.4%	98.5%	98.0%	78.6%	102%
Paniai	99.1%	100.6%	97.9%	98.1%	95.0%	100%
Deyai	100.0%	100.7%	97.4%	98.9%	100.2%	100%
Dogiyai	100.5%	101.8%	99.7%	98.3%	94.7%	97%
Mamb Tengah	100.0%	98.7%	102.0%	99.2%	98.5%	99%
Mambramo Raya	95.9%	95.1%	98.9%	95.9%	96.3%	94%
RATA-RATA	100.3%	99.1%	98.1%	97.4%	91.8%	97.6%

Selain *value for money* kualitas kuangan daerah juga dapat dilihat opini audit oleh auditor terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Selama 6 tahun terakhir, kualitas pengelolaan cenderung mengalami peningkatan meskipun, peningkatkan sangat lambat. Misalah kabupaten yang tidak memberikan pendapat opini audit oleh BPK pada tahun 2012 masih 87 persen, namun 4 tahun kemudian terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan selama periode penelitian. Kabupaten yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian juga cenderung naik. Dengan kabupaten yang mendapatkan wajat tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas tidak mengalami perubahan.



Grafik opini audit ini, mencerminkan bahwa pengelolaan laporan keuangan 15 kabupaten kota belum optimal. Salah satu hal yang berdampak terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah yakni keterlambatan dalam penyerapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang. Keterlambatan penyerapan anggaran juga berpengaruh terhadap kualitas belanja publik pemerintah daerah. Penyerapan anggaran di akhir-akhir tahun meningkatkan signifikan dari pada awal dan pertengahan tahun. Hal ini menyebabkan penerapan dan penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga berdampak terhadap penciptaan kualitas pembangunan. penyerapan anggaran diakhir yang meningkat signifikan patut diduga, pemerintah hanya sekesar mengejar suatu target yakni penghabisan anggaran bukan berdasarkan pada outcomenya. Pengelolaan keuangan publik yang baik sepatutnya mengikuti sistem pengelolaan keuangan yang berlaku secara terstruktur, terencana dengan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan yang berkesinambungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja keuangan 15 kabupaten dinilai dengan tiga indikator pendekatan *value for money* anara lain ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan indikator ekonomi selama 6 tahun terakhir di 15 kabupaten kota berfluktuatif dan berada di bawah angka 100 persen sehingga secara agregat dikatakan telah memenuhi syarat ekonomis *value for money*. Kinerja keuangan dari sisi efisiensi selama 6 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan secara agregat berada di bawah 100 persen, sehingga kinerja keuangan telah memenuhi syarat sangat efisiensi *value for money*. Yang

terakhir, indikator efektifitas. Perhitungan kinerja keuangan dari sisi efektivitas selama 6 tahun terakhir secara individu per kabupaten sangat berfluktuatif. Secara agregat juga berfluktuatif, dan tingkat efektivitasnya berada di bawah 100 persen, artinya kinerja keuangan memenuhi syarat cukup Efektivitas *value for money*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama 6 tahun terakhir 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah pengelolaan keuangan cukup efektif. Berdasarkan telah aspek-aspek *value for money*, kualitas pengelolaan keuangan 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Kadafi, "Permasalahan keuangan negara dan daerah," *J. Eksis*, vol. 8, no. 2, pp. 2205–2210, 2012.
- [2] A. A. P. Isna Ardila., "ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, Nov. 2015.
- [3] H. S. Liando *et al.*, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 3, pp. 1686–1694, Oct. 2014.
- [4] D. Nordiawan and A. Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TERBUKA, 2014.
- [5] I. Indrayani and K. Khairunnisa, "ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE: (STUDI KASUS PADA DPKAD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2014-2016)," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Sep. 2019.
- [6] T. A. Perdana, R. A. Budiantoro, and F. I. F. S. Putra, "Mengukur kinerja apbd kota surabaya analisis value for money," vol. 16, no. 2, pp. 339–346, 2020.
- [7] P. A. ERAWAN, M. S. W. A. SANTOSA, D. K. B. BUDIARTHA, and P. T. A. WAHYUDI, "Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng," *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 8, no. 3, pp. 187–193, 2019.
- [8] A. Hamid and I. Lamuda, "Evaluation of Financial Performance Through Approach To Value for Money Pendekatan Value for Money," *Gorontalo Account. J.*, vol. 2, pp. 31–41, 2019.
- [9] Irmawati and R. Rinaldy, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015," *J. Akunt. Muhammadiyah*, vol. 8, no. 1, pp. 93–99, 2015.
- [10] A. Anggito and J. Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- [11] K. Khalikussabir, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN VALUE FOR MONEY (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo)," *J. Ilm. Ris. Manaj.*, vol. 6, no. 03, Aug. 2017.